PMK 81 Tahun 2024

Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

BAB	Keterangan		Pasal	Halaman
I	**KETENTUAN UMUM**		1	3 sd 26
II	**RUANG LINGKUP**		2	27
III	**TATA CATA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN PENERBITAN,PENANDANTANGAN, SERTA PENGIRIMANKEPUTUSAN, DAN DOKUMEN ELEKTRONIK**		3 sd 14	27 sd 36
IV	**TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**			
	Bagian Kesatu	Tata Cara Pendaftaraan Wajib Pajak	15 sd 59	36 sd 58
	Bagian Kedua	Tata Cara Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	60 sd 70	59 sd 65
	Bagian Ketiga	Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan	71 sd 93	65 sd 78
V	**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG, IMBALAN BUNGA, SERTA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK**			
	Bagian Kesatu	Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak	94 sd 121	78 sd 99
	Bagian Kedua	Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang	122 sd 137	99 sd 112
	Bagian Ketiga	Tata Cara Pemberian Imbalan Bunga	138 sd 149	112 sd 120
	Bagian Keempat	Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak	150 sd 160	120 sd 130
VI	**TATA CARA PENYAMPAIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN**			
	Bagian Kesatu	Surat Pemberitahuan	161 sd 190	130 sd 150
	Bagian Kedua	Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya	191 sd 200	150 sd 158
	Bagian Ketiga	Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu	201 sd 207	158 sd 162

PMK 81 Tahun 2024

Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

BAB	Keterangan		Pasal	Halaman
	Bagian Keempat	Tata Cara Pemotongan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Lain Kontraktor Berupa U*plift* atau Imbalan Lain yang Sejenis dan/atau Penghasilan Kontraktor dari Pengalihan Partisipasi Interes	208 sd 216	162 sd 165
	Bagian Kelima	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain	217 sd 225	165 sd 177
	Bagian Keenam	Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu	226 sd 237	177 sd 183
	Bagian Ketujuh	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap atas Penghasilan Berupa Keuntungan dari Penjualan Saham	238 sd 240	183 sd 184
	Bagian Kedelapan	Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi dan Premi Reasuransi yang Dibayar kepada Perusahaan Asuransi di Luar Negeri	241 sd 243	184 sd 186
	Bagian Kesembilan	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek	244 sd 249	186 sd 188
	Bagian Kesepuluh	Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi	250 sd 264	188 sd 194
	Bagian Kesebelas	Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri	265 sd 277	194 sd 201
	Bagian Kedua Belas	Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai	278 sd 285	201 sd 206

PMK 81 Tahun 2024

Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

BAB	Keterangan		Pasal	Halaman
	Bagian Ketiga Belas	Tata Cara Pengurang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembalikan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Kena Pajak yang Dibatalkan	286 sd 290	206 sd 210
	Bagian Keempat Belas	Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertamabahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan Usaha Milik Negara dan Perusahaan Tertentu yang Dimiliki secara Langsung oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai	291 sd 297	210 sd 214
	Bagian Kelima Belas	Penunjukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi dan Kontraktor atau Pemegang Kuasa/ Pemagang Izin Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi untuk memungut, Menyetorkan, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya	298 sd 304	214 sd 217
	Bagian Keenam Belas	Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi untuk memungut, menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertamabahn Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, penyetoran, dan Pelaporannya	305 sd 311	217 sd 220
	Bagian Ketujuh Belas	Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi	312 sd 322	221 sd 227
	Bagian Kedelapan Belas	Pajak pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri	323 sd 331	227 sd 230
	Bagian Kesembilan Belas	Tata Cara Penunjukan Pihak Lain, Pemungtuan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	332 sd 339	231 sd 235
	Bagian Keduapuluh	Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto	340 sd 369	235 sd 249
	Bagian Kedua Puluh Satu	Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak penghasilan atas Dividen atau Penghasilan Lain	370 sd 374	249 sd 251
	Bagian Kedua Puluh Dua	Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan	375 sd 381	251 sd 257

PMK 81 Tahun 2024

Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

BAB	Keterangan		Pasal	Halaman
	Bagian Kedua Puluh Tiga	Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak dan Tata cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak	382 sd 390	257 sd 261
VII	**TATA CARA PEMBERIAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN**			
	Bagian Kesatu	Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha	392 sd 406	261 sd 274
	Bagian Kedua	Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu / atau di Daerah-daerah Tertentu	407 sd 422	275 sd 288
	Bagian Ketiga	Pemberian Fasilitas Pengurang Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya	423 sd 431	288 sd 294
	Bagian Keempat	Pemberian Pengurang Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia	432 sd 441	294 sd 303
	Bagian Kelima	Kriteria Keahlian Tertentu serta Tata Cara Pengenaan pajak Penghasilan bagi Warga Negara Asing	442 sd 447	303 sd 305
	Bagian Keenam	Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan	448 sd 463	305 sd 314
VIII	**KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN**		464 sd 467	314 sd 316
IX	**CONTOH FORMAT DOKUMEN DAN CONTOH PENGHITUNGAN, PEMUNGUTAN, DAN/ATAU PELAPORAN**		468 sd 471	317 sd 323
X	**KETENTUAN PERALIHAN**		472 sd 478	323 sd 333
XI	**KETENTUAN PENUTUP**		479 sd 484	333 sd 341